

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MENCAPAI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM KONTEKS PARTISIPASI POLITIK

Zaky Maulana Fajri¹, Faristamal Ardian², Araia Handaru³, Aniqotul Ummah⁴
2210413043@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210413104@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210413091@mahasiswa.upnvj.ac.id³, aniqotul.ummah@upnvj.ac.id⁴
UPN Veteran Jakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis tantangan serta peluang dalam mencapai kesetaraan gender dalam partisipasi politik dan representasi perempuan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik, serta untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara mendalam dengan para ahli dan aktivis gender serta politisi perempuan. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam politik dan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan partisipasi perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan politik perempuan di Indonesia masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk stereotip gender, budaya patriarki, dan kebijakan yang tidak sepenuhnya mendukung partisipasi perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah dan berbagai organisasi untuk mendorong kesetaraan gender, implementasinya masih belum efektif dan seringkali terhambat oleh kurangnya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, kebijakan yang ada belum mampu mengatasi ketidaksetaraan struktural yang menjadi akar permasalahan dalam keterwakilan perempuan di politik. Kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik masih memerlukan usaha yang berkelanjutan dan komprehensif. Diperlukan konsensus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan rekomendasi kebijakan dan strategi praktis untuk meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan, serta mendorong reformasi struktural yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender; Partisipasi Politik; Representasi Perempuan; Rekomendasi Kebijakan.

***Abstract:** This article aims to explore and analyze the challenges and opportunities in achieving gender equality in political participation and representation of women in Indonesia. The research seeks to deepen understanding of the barriers faced by women in politics and to identify strategies that can be implemented to enhance women's representation. This study employs a qualitative approach with methods including literature review and in-depth interviews with gender experts, activists, and female politicians. Data collected are analyzed to uncover factors influencing women's political representation and policies that could support increased women's participation. Findings indicate that women's political representation in Indonesia is still hindered by various factors, including gender stereotypes, patriarchal culture, and policies that do not fully support women's participation. The research reveals that despite efforts by the government and various organizations to promote gender equality, implementation remains ineffective and often hampered by lack of support from stakeholders. Moreover, existing policies have not adequately addressed the structural inequalities that underlie the issue of women's representation in politics. The conclusion emphasizes that the struggle for gender equality in politics requires sustained and comprehensive efforts. It calls for consensus among various stakeholders, including government, political parties, and civil society, to create an enabling environment for women's political participation. The article contributes by offering policy recommendations and practical strategies to enhance political education for women and advocate for more inclusive structural reforms. Thus, the article enriches the literature on gender and politics while providing guidance for policymakers and practitioners to implement concrete steps toward greater gender equality in the political arena in Indonesia.*

Keywords: Gender Equality; Political Participation; Women's Representation; Policy Recommendations.

PENDAHULUAN

Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Perbedaan ini bukanlah hasil dari kodrat atau ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses kultural yang panjang. Nasaruddin Umar (2001) serta Howard, Judith A, dan Jocelyn Hollande (1997) menyatakan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan merupakan konstruksi sosial. WHO (World Health Organization) juga mendefinisikan gender sebagai seperangkat peran, perilaku, aktivitas, dan sifat yang dianggap sesuai untuk pria dan wanita. Studi gender memiliki akar pada antropologi feminis, seperti yang diutarakan oleh Malihah et al. (2020). Oleh karena itu, seringkali istilah gender disalahartikan sebagai konsep feminis murni. Namun, studi gender sebenarnya lebih luas, memperhatikan konstruksi budaya dari laki-laki dan perempuan serta meneliti perbedaan dan persamaan pengalaman mereka dalam berbagai konteks. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi kedua gender terhadap berbagai jenis hubungan sosial.

Indonesia, sebagai salah satu negara berpenduduk padat, menunjukkan komposisi penduduk perempuan yang sedikit lebih besar daripada laki-laki. Menurut Rachmina (2009), kesetaraan gender di Indonesia masih belum tercapai, terutama karena adat yang sangat mengikat pada masa lalu. Pada masa itu, peran perempuan hanya terbatas di rumah, dan tidak semua perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Paradigma masyarakat saat itu menganggap perempuan sebagai makhluk lemah yang tidak memiliki kiprah luas dalam ranah publik. Ketidaksetaraan gender ini menyebabkan banyak permasalahan yang dihadapi perempuan. Isu gender di Indonesia mencakup berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Partisipasi perempuan Indonesia di parlemen masih sangat rendah. Data dari Bank Dunia (2019) menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-7 se-Asia Tenggara dalam hal perwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya angka keterwakilan perempuan ini mempengaruhi kebijakan terkait kesetaraan gender.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada tahun 2012 masih rendah dengan nilai 68,52, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 73,29. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tujuan untuk menciptakan kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai. Banyak perempuan masih mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, kesempatan ekonomi, serta keterlibatan dalam kegiatan publik dan pengambilan keputusan. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Femmy Eka Kartika Putri, menekankan pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen. Saat ini, partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik penting agar pengambilan keputusan politik lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, hal ini juga mendukung penguatan demokrasi dan menghasilkan undang-undang yang ramah perempuan dan anak.

Rendahnya peran dan partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pembangunan juga dapat dilihat dari aspek pendidikan digital yang seharusnya mendukung kesetaraan gender. Menurut Anggraeni et al. (2022), Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia berada di angka 92,74. Meskipun ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara, namun masih di bawah laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam legislatif dan eksekutif juga masih rendah. Selain itu, perempuan dalam struktur kepengurusan lembaga negara juga belum mencapai 30%. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi hanya memiliki sekitar 20% keterwakilan perempuan, Mahkamah Konstitusi 13%, Komisi Yudisial 14%, dan Komisi Pemilihan Umum hanya 4%. Bahkan, dalam tatanan jabatan birokrasi, perempuan yang menduduki posisi setingkat eselon I dan II hanya mencapai 16,57%.

Kesetaraan gender merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan tujuan untuk mewujudkan Planet 50:50 Gender Equality tahun 2030. Tujuannya agar perempuan bisa sejalan dan setara dengan laki-laki, tidak hanya dalam urusan

domestik tetapi juga sebagai bagian penting dalam pembangunan dan pengambilan keputusan negara. Semakin banyak keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, semakin optimis lahirnya kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Untuk mendukung pemerintah dalam penerapan SDGs, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) memutuskan tiga program prioritas yang disebut dengan Three Ends atau Tiga Akhiri. Program ini meliputi Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, Akhiri perdagangan perempuan, dan Akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar mereka bisa lebih mandiri dan memiliki kontrol atas kehidupan mereka.

Pemberdayaan perempuan adalah proses kesadaran dan pembentukan kapasitas untuk partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, dan pengawasan dalam pembuatan keputusan serta tindakan transformasi menuju kesetaraan yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Menurut Prijono dan Pranaka (1996), pemberdayaan adalah transformasi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan pada tingkat keluarga, masyarakat, pasar, dan negara. Status perempuan hanya akan meningkat ketika mereka dapat mandiri dan mengontrol keputusan yang berkaitan dengan hidupnya. Pemberdayaan perempuan juga merupakan strategi penting untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengembangkan potensinya sehingga dapat lebih mandiri dan berkontribusi. Kesadaran mengenai peran perempuan ini mulai berkembang dan diwujudkan dalam berbagai program pembangunan. Hal ini didasarkan pada kebutuhan perempuan akan kemandirian agar pertumbuhannya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan ini tidak hanya berarti mendukung keputusan yang sudah ada, tetapi juga terlibat dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan hingga evaluasi keputusan. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan dalam masyarakat dan negara. Jumlah penduduk perempuan yang hampir setengah dari total penduduk Indonesia merupakan potensi besar untuk kemajuan dan kualitas hidup yang lebih baik. Kondisi yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan kesempatan dan hak yang sama penting untuk meningkatkan peran dan partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Undang-undang Dasar 1945, khususnya Bab X tentang Kewarganegaraan, menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini mencakup semua gender tanpa pembedaan. Sejak tahun 1945, prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan sebenarnya sudah diakui. Kesetaraan dan keadilan gender tercapai ketika tidak ada subordinasi antara pria dan wanita, memungkinkan akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta mendapatkan manfaat yang setara dan adil. Secara historis, penguasaan pria dalam berbagai lapisan masyarakat telah menyebabkan doktrin ketidaksetaraan antara pria dan wanita. Kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran harmonis antara pria dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam pendidikan dan pembangunan, adalah hal yang penting. Semua ini dilandasi oleh rasa saling menghormati, membantu, dan melengkapi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah memahami fenomena kesetaraan dan keadilan gender melalui analisis mendalam terhadap data dan sumber-sumber literatur yang

relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pandangan, dan pengalaman yang mendasari isu-isu gender, serta memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi peran perempuan dalam masyarakat. Metode studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen resmi. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender, partisipasi politik perempuan, serta pemberdayaan perempuan. Sumber-sumber tersebut akan dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan aktualitas untuk memastikan kualitas dan keandalan data yang digunakan dalam penelitian.

Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, penyortiran dan pengorganisasian data, serta analisis tematik. Pada tahap pertama, peneliti akan mengumpulkan literatur yang relevan dari berbagai sumber, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Setelah itu, data akan disortir dan diorganisasikan berdasarkan tema-tema utama yang terkait dengan topik penelitian. Tahap terakhir adalah analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi tema-tema yang muncul dari data literatur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu kesetaraan dan keadilan gender. Melalui metode studi kepustakaan, penelitian ini berupaya menyusun gambaran yang komprehensif mengenai kesetaraan dan keadilan gender dengan memanfaatkan wawasan dari berbagai penelitian sebelumnya. Hasil analisis literatur akan digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam pengetahuan saat ini tentang isu gender, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan dan praktik yang dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademik dan praktik nyata dalam upaya pemberdayaan perempuan dan pencapaian kesetaraan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan di Era Modern

Pemberdayaan dan partisipasi perempuan merupakan isu yang sangat relevan untuk diperdebatkan dan diperjuangkan. Sejak era Orde Baru hingga saat ini, pemberdayaan perempuan selalu menjadi gerakan yang hangat dan menarik untuk diperbincangkan tentang kehidupan di masyarakat. Pertempuran sebenarnya sudah dimulai dan dideklarasikan sejak lama, setidaknya 146 tahun yang lalu, ketika RA Kartini berusia 12 tahun. Pada titik ini, ia harus menyelesaikan sekolah di ELS (Europees Lagere School). Karena budaya telah memaksanya memasuki era keterasingan. Di Indonesia, peningkatan peran dan partisipasi perempuan bertujuan untuk memfasilitasi kemitraan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan di semua bidang kehidupan sosial. Kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial mengisyaratkan persamaan hak, saling menghormati, dan bekerja sama. Tidak ada dominasi, saling menguasai, dan pemaksaan kehendak. Filosofi ini menggambarkan pentingnya perempuan dan laki-laki untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dalam segala sisi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan di mana mereka bisa berperan aktif tanpa adanya diskriminasi.

Peran perempuan dalam pembangunan bangsa sangat penting. Mereka tidak hanya menjadi bagian dari keluarga tetapi juga berperan dalam masyarakat luas. Keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan politik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk menghapus kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat. Sejak era Kartini, perempuan Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi besar yang perlu dihargai

dan dikembangkan. Namun, hambatan budaya dan sosial seringkali menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya terus-menerus untuk mengubah paradigma ini dan menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan. Pendidikan merupakan salah satu alat utama untuk memberdayakan perempuan, memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan.

Di bidang politik, representasi perempuan masih jauh dari harapan. Pendidikan politik merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan orientasi politik setiap individu dan kolektif. Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi warga negara yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Kesetaraan dalam partisipasi politik sangat penting untuk mencapai keadilan gender. Meskipun ada kemajuan, masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Kesadaran politik di kalangan perempuan perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh. Dengan demikian, perempuan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik dan mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Selain politik, peran perempuan dalam ekonomi juga sangat penting. Perempuan harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha. Pemberdayaan ekonomi perempuan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, perempuan yang mandiri secara ekonomi cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dalam keluarga dan masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial juga tidak kalah penting. Perempuan seringkali memainkan peran kunci dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan komunitas. Dengan memberdayakan perempuan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang penting untuk keberlanjutan masyarakat. Partisipasi aktif perempuan dalam berbagai organisasi dan kegiatan sosial dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat.

Pemberdayaan perempuan juga berkaitan erat dengan kesehatan dan kesejahteraan. Perempuan yang sehat dan memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dapat berkontribusi lebih baik dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Ini juga termasuk pendidikan tentang kesehatan yang dapat membantu perempuan membuat keputusan yang lebih baik tentang tubuh mereka dan kesehatan keluarga mereka. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius di banyak bagian dunia, termasuk Indonesia. Untuk memberdayakan perempuan, kita perlu memastikan bahwa mereka bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional.

Kesetaraan gender tidak hanya bermanfaat bagi perempuan tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan, kita dapat memanfaatkan potensi penuh dari seluruh populasi. Ini dapat mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional dan internasional. Akhirnya, pemberdayaan dan partisipasi perempuan adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender, kita dapat memastikan bahwa semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dapat berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan masyarakat. Ini bukan hanya tentang memberikan hak-hak yang sama tetapi juga tentang menghargai dan memanfaatkan peran unik yang dapat dimainkan oleh perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Tantangan dan Peluang dalam Pendidikan Politik untuk Perempuan

Wacana keterwakilan politik perempuan dalam konteks demokratisasi telah lama tenggelam dalam narasi pembangunan yang pragmatis dan represif. Program pembangunan yang berakar pada ideologi pertumbuhan dan kontrol ketat kebijakan stabilitas sangat diusung oleh rezim Suharto saat itu. Hal ini mengaburkan nilai dan semangat perjuangan perempuan Indonesia yang terlihat lebih substantif di masa awal revolusi. Kini, seiring berjalannya waktu, kiprah, posisi, dan aktualisasi perempuan dalam kehidupan sosial-politik semakin menyusut. Di era Demokrasi Terpimpin, kiprah sosial-politik perempuan cenderung terfragmentasi sebagai konsekuensi dinamika politik yang konflikual, meskipun posisi politik perempuan saat itu nisbi kuat, mereka tetap berada dalam posisi diskriminasi dan sering digunakan sebagai instrumen politik negara. Di era Orde Baru, meski pemerintah Soeharto memiliki political will untuk menciptakan kementerian yang khusus menangani masalah perempuan, orientasi politik negara korporatik tetap menyuburkan pola politik patron-client dan kultur hegemoni “politik lelaki”. Perempuan diperbolehkan berkiprah sosial-politik, namun sebatas fungsi normatifnya dan di bawah kendali ketat negara korporatik. Memasuki era reformasi, para Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, terutama pada era kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa, secara gigih terus mengangkat isu kesetaraan gender menjadi mainstream. Namun, upaya keras para menteri perempuan, aktivis, dan berbagai organisasi perempuan untuk mewujudkan persamaan hak sering terbentur oleh kultur patriarki dan praktik politik anti partisipasi.

Dalam struktur masyarakat patriarkis, konstruksi sosial-budaya perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Legitimasi dan dominasi ini terlihat dari sikap masyarakat yang menempatkan seksualitas perempuan sebagai komoditas dan alat pemuas hasrat seksual laki-laki. Dalam struktur kekuasaan patriarki, politik tidak hanya mencerminkan kepentingan kekuasaan dan uang, tetapi juga gender. Terungkapnya hubungan asmara antara politisi DPR dan artis dangdut beberapa waktu lalu membuktikan fusi antara kekuasaan, uang, dan seks. Politik kekuasaan membuat agen politik tidak hanya haus kekuasaan, tetapi juga bernafsu. Penurunan moralitas politik di tingkat elit ditandai oleh politik yang tidak hanya duniawi tetapi juga tidak setara, menunjukkan karakter dasar dari patriarki yang kuat.

Budaya politik patriarki memperkuat argumentasi bahwa posisi perempuan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma konservatif. Kaum feminis yang menganut paham pluralisme-demokratis meyakini bahwa perempuan tidak boleh dirugikan hanya karena jenis kelaminnya. Sebagai manusia, perempuan juga membutuhkan pengakuan atas keberadaan keperempuannya. Gerakan feminis menentang pandangan stereotip yang memarginalkan peran perempuan sebatas fungsi domestik, bukan dalam konteks kehidupan publik yang lebih luas. Kendati sistem dan kebijakan politik pemerintah terhadap isu perempuan semakin responsif gender, posisi perempuan dalam konteks kekuasaan politik tetap rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik dan sering digunakan sebagai alat legitimasi politik. Asumsi sederhana bahwa perempuan adalah unit dasar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat membuat kontrol atas peran perempuan menjadi instrumen efektif dalam mengendalikan kekuasaan negara. Berbagai peraturan negara tentang masalah perempuan menunjukkan bahwa konstruksi budaya politik patriarki sepanjang sejarah sangat mempengaruhi kehidupan perempuan. Sejak dekade 1960-an, gerakan feminisme yang menggeliat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia pada dekade 1990-an, terus menggugat dasar kebijakan negara yang bias gender. Gerakan ini mendorong peran, fungsi, dan posisi perempuan secara lebih progresif serta memprotes berbagai kebijakan konservatif negara dan stigma masyarakat yang memarginalisasi aspirasi, hak, dan kepentingan perempuan.

Pendidikan politik bagi perempuan menghadapi tantangan besar dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Kurangnya representasi perempuan dalam politik mengakibatkan minimnya suara perempuan dalam pengambilan keputusan. Hal ini diperparah oleh stereotip gender yang menempatkan perempuan dalam peran domestik dan menganggap mereka kurang kompeten

dalam urusan publik. Pendidikan politik yang efektif harus mampu mengubah paradigma ini dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Namun, pendidikan politik juga menawarkan peluang besar untuk pemberdayaan perempuan. Dengan meningkatkan kesadaran politik dan keterampilan kepemimpinan, perempuan dapat lebih berperan dalam proses demokratisasi dan pengambilan keputusan. Pendidikan politik yang inklusif dapat membantu perempuan memahami hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya. Ini juga menciptakan jaringan dukungan yang dapat menguatkan posisi mereka dalam politik.

Di era digital, teknologi informasi juga dapat menjadi alat yang efektif dalam pendidikan politik untuk perempuan. Media sosial dan platform online dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan perempuan. Selain itu, teknologi dapat membantu perempuan mengorganisir diri dan membangun gerakan sosial yang lebih kuat. Ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik tanpa harus menghadapi hambatan fisik atau budaya yang sering menghalangi partisipasi mereka. Kemajuan teknologi juga memungkinkan pendidikan politik yang lebih fleksibel dan dapat diakses oleh perempuan di berbagai lapisan masyarakat. Program pendidikan politik online dapat menjangkau perempuan di daerah terpencil yang mungkin tidak memiliki akses ke pelatihan politik tradisional. Ini membuka peluang bagi perempuan dari berbagai latar belakang untuk terlibat dalam politik dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Pendidikan politik yang baik juga harus mencakup pemahaman tentang isu-isu gender dan bagaimana mereka mempengaruhi politik. Dengan memahami dinamika gender dalam politik, perempuan dapat lebih siap menghadapi tantangan yang mereka hadapi dan menemukan cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Ini juga penting untuk menciptakan kesadaran di kalangan laki-laki tentang pentingnya kesetaraan gender dalam politik. Selain itu, pendidikan politik harus menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama antara perempuan. Dengan membangun jaringan dan aliansi, perempuan dapat saling mendukung dan memperkuat posisi mereka dalam politik. Solidaritas ini juga penting untuk menciptakan gerakan yang lebih kuat dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan sosial.

Di Indonesia, pendidikan politik bagi perempuan perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang responsif gender. Pemerintah harus menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung program pendidikan politik. Ini termasuk dukungan finansial, pelatihan, dan akses ke informasi yang relevan. Dengan dukungan yang memadai, pendidikan politik dapat menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam politik. Akhirnya, pendidikan politik untuk perempuan harus mencakup pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan politik dan sosial. Dunia politik terus berubah, dan perempuan perlu siap untuk menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang yang muncul. Dengan pembelajaran yang berkelanjutan, perempuan dapat terus berkembang dan berkontribusi secara efektif dalam politik, mendorong perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Kesetaraan Gender dalam Konteks Sosial dan Politik

Kesetaraan gender dalam konteks sosial dan politik merupakan isu yang terus menerus dibahas dan diperjuangkan oleh para feminis. Mereka menuntut perubahan progresif atas posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam polemik poligami, kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak reproduksi perempuan, dan peraturan daerah mengenai pelacuran. Menurut Gadis Arivia (2005), hampir semua regulasi negara yang terkait dengan perempuan mengandung bias gender. Dalam masyarakat patriarkis, konstruksi sosial-budaya perempuan sering digunakan sebagai alat legitimasi politik, yang menjadi tantangan fundamental bagi gerakan perempuan ke depan. Salah satu isu utama adalah dampak globalisasi-neoliberal yang telah melahirkan kekuatan ekonomi dunia berpusat di negara-negara maju. Restrukturisasi ekonomi di negara-negara miskin dan berkembang menciptakan situasi kemiskinan yang semakin akut dan kompleks. Ekonomi global menarik

perempuan sebagai objek ekonomi dan komoditas, seperti pekerja rumah tangga, pekerja seks, migran, atau pekerja berupah rendah. Situasi ini mempersulit perempuan untuk mencapai kesetaraan ekonomi dan sosial.

Tantangan kedua adalah otoriterisme politik negara. Kontrol berlebihan negara atas warganya, terutama perempuan, menghasilkan berbagai kebijakan yang bias hak asasi manusia dan gender, serta mereduksi hakikat demokrasi. Contoh kebijakan bias gender termasuk RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi, serta berbagai peraturan daerah yang berdasarkan penafsiran sempit atas kepercayaan eksklusif. Implementasi atas hak-hak sipil dan politik perempuan belum sepenuhnya mendapatkan ruang mobilitas dari negara. Kebijakan negara yang tidak pro-rakyat menjadi tantangan ketiga. Manajemen aturan negara, prioritas pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam masih didasarkan pada kebutuhan para politisi, elite ekonomi, investor, dan kepentingan kapital global. Kebijakan ini mereduksi akses warga, khususnya perempuan, ke sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sumber-sumber kehidupan publik yang mendasar seperti pangan, energi, air, tanah, dan hutan.

Fundamentalisme kepercayaan menjadi tantangan keempat. Gerakan kepercayaan yang berupaya melawan intervensi Barat dan kapitalisme dengan perilaku radikal dan sepihak menyebabkan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Organisasi massa yang mengatasnamakan kepercayaan eksklusif seringkali membatasi ruang mobilitas dan aktualisasi diri perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, menjadikan perempuan objek kekerasan. Liberalisasi politik sejak era reformasi tidak otomatis diikuti oleh kesiapan lembaga pendidikan dan rekrutmen politik, terutama partai politik, untuk membuka kesempatan partisipasi perempuan secara serius dan berkelanjutan. Partai politik masih enggan menempatkan perempuan dalam posisi dan tanggung jawab organisatoris yang signifikan, serta memberikan kesempatan yang setara dengan laki-laki. Ini menjadi tantangan kelima yang harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik.

Gerakan perempuan harus mampu mendobrak lobi-lobi politisi laki-laki yang elitis dan budaya politik partai yang sentralistis dan patriarkat. Perubahan budaya politik dan pola pikir elite partai diperlukan untuk memberi ruang dan peluang yang lebih besar bagi kader politik perempuan. Pelatihan dan edukasi politik bagi perempuan harus diutamakan, serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam berbagai jabatan strategis dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Ini adalah tantangan keenam yang perlu dihadapi. Meski kuota 30% sangat strategis, regulasi hanyalah salah satu faktor kunci dalam upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan. Setelah pemilihan umum 2014, perempuan perlu memperluas makna representasi politik. Partisipasi perempuan dalam sistem politik tidak hanya sebatas berpartisipasi dalam proses, mekanisme, institusi, dan sistem politik, tetapi juga tentang bagaimana institusi akar rumput beroperasi. Tantangan ketujuh ini menuntut pendekatan yang lebih holistik dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Kesetaraan gender dalam konteks sosial dan politik juga membutuhkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Edukasi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender harus dimulai sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Masyarakat perlu memahami bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang hak perempuan, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Selain itu, media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mempromosikan kesetaraan gender. Media harus menyajikan pemberitaan yang adil dan tidak bias gender, serta mengangkat isu-isu perempuan dengan perspektif yang objektif dan mendalam. Media juga dapat menjadi platform bagi perempuan untuk menyuarakan aspirasi dan perjuangan mereka dalam mencapai kesetaraan gender.

Kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga krusial dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang responsif

gender, sementara masyarakat sipil dan sektor swasta dapat memberikan dukungan melalui berbagai program dan inisiatif yang memberdayakan perempuan. Sinergi antara ketiga pihak ini akan mempercepat tercapainya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Pada akhirnya, kesetaraan gender dalam konteks sosial dan politik adalah tujuan yang harus terus diperjuangkan. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar dan kompleks, dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak, perubahan yang signifikan dapat dicapai. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan bagi perempuan, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera bagi semua.

KESIMPULAN

Kesetaraan gender dalam partisipasi politik dan pencapaian representasi politik oleh perempuan di Indonesia masih memerlukan perjuangan panjang dan kerja keras. Kondisi ini melibatkan kemampuan perempuan untuk bertanggung jawab, bersaing, dan memberikan kontribusi yang berarti dalam politik nyata. Masyarakat yang masih percaya pada kodrat perempuan sebagai makhluk lemah dan sensitif menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah keterwakilan politik perempuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi yang setara dan partisipatif serta wacana gender dalam kerangka pluralisme demokrasi (non-patriarki) menjadi prioritas politik masa depan. Dengan demikian, struktur sosial demokrasi yang berkeadilan gender dapat benar-benar terwujud di Indonesia.

Oleh karena itu, upaya terbaik untuk mencapai kesetaraan gender, terutama dalam dunia politik dan pengambilan keputusan, harus dilakukan melalui konsensus dan usaha yang berkelanjutan. Hal ini memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan dari semua lapisan masyarakat, termasuk aktor politik seperti partai politik, organisasi masyarakat, dan pemerintah melalui instansi mereka masing-masing. Pelaksanaan pendidikan politik bagi perempuan yang lebih luas dan terencana menjadi kunci penting dalam upaya ini. Dengan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak, kesetaraan gender dalam politik dapat lebih cepat terwujud, menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan gender di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, L., Anggraeni, L., Affandi, I., Wahyudin, D., Paramitha, S. T., & Gilang, M. (2022). Optimization of the Board Game as a Platform for the Concept of Peace Education : A Survey Method Study To cite this article : method study . *International Journal of Education in Mathematics , Science , and Technology Optimization of the Board Game as a* .
- Aslichati, L. (2011). Organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai sarana pemberdayaan perempuan. *Jurnal organisasi dan manajemen*, 7(1), 1-7.
- Bappenas. (2001). Analisis Gender dalam Pembangunan Pendidikan. Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama Dede
- Barus, R. K. (2015). Pemberdayaan Perempuan melalui Media Sosial. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 1(2).
- Echols, John M., dkk. 2003. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia. INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, UNFPA dan BKKBN. 2001. *Bunga Rampai Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kependudukan*. Buku 02.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018. *Partisipasi Perempuan Politik Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta : Lintas Khatulistiwa.
- Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is There Zero Women Candidate for Governor Election in West Java, Indonesia ? *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373>

- Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, Hak Azasi Perempuan: Instrumen untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2004.
- Rachmina, D. (2009). Fenomena kesetaraan gender dalam kredit. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*, 3(1). Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, Perempuan dan Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2005
- Robani, M. M., & Ekawaty, M. (2019). Analisis dampak pemberdayaan perempuan terhadap kesejahteraan keluarga. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 1-18